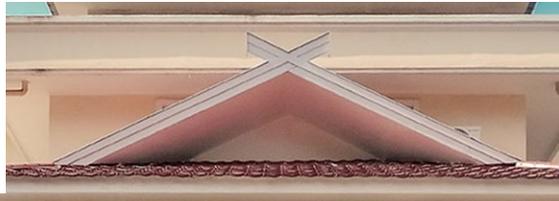


RENCANA KERJA PERUBAHAN



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran pertahun dari RPJMD. Adapun penyusunan RENJA SKPD merupakan amanat dari Undang – Undang N0.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari permendagri nomor 86 tahun 2017

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan Faktor mendasar guna lebih mengarahkan ke arah tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna untuk kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Jambi, 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Jambi



FAHM.SP
Pembina TK.I

Nip. 19670205 199803 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3	Landasan Hukum	3
1.4	Maksud dan Tujuan	4
1.5	Sistematika Penulisan	5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	11
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	13
2.4	Analisa Isu-Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.5	Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	20
2.6	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1	Visi dan Misi	24
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	25
3.3	Program dan Kegiatan	27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	Indikator Kinerja	30
	Pendanaan	30

BAB V	PENUTUP	32
-------	---------	----



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang buruk merupakan kegagalan awal dalam menentukan pencapaian tujuan, oleh karenanya proses penyusunan perencanaan ini perlu kehati-hatian dan ketelitian dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang dengan memperhatikan azas demokrasi. Sedangkan perencanaan pembangunan pada hakekatnya bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, dengan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, waktu dan fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat mengoptimalkan suatu pencapaian tujuan dengan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Dalam Kehidupan organisasi bernegara kita perencanaan menjadi salah satu kewajiban Nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi Publik/Pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka



Menengah(RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Jambi merupakan dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan perencanaan yang baik. Selain itu renja DPMPTSP disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis DPMPTSP dan RPJMD tahun 2013-2018 yang bersifat indikatif. Dengan demikian rencana kerja DPMPTSP Kota Jambi ini merupakan implementasi kebijakan pembangunan daerah dalam bidang penanaman modal.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, DPMPTSP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut DPMPTSP Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di dibidang Penanaman Modal.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu.
- c. Pelaksanaan Pengkajian,pengendalian dan promosi Investasi Penanaman Modal.
- d. Pelaksanaan Administrasi pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu.



- e. Pelaksanaan Koordinasi proses penanaman Modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.
- f. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum DPMPTSP Kota Jambi dalam menyusun Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.;



11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah;

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja ini adalah :

1. Menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci.
2. Merumuskan Program – Program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
4. Menciptakan Efektivitas dan Efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan Pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan SKPD dengan



program dan kegiatan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

1.4.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2018 adalah untuk membantu pencapaian hasil pelaksanaan program dan memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun kedepan.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2018 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD



- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Analisa Isu- Isu Strategis berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
- 2.5 Review terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Jambi adalah penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Jambi tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut rencana kerja DPMPTSP Kota Jambi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Jambi selama tahun 2018.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan keluaran dan hasil.

Indikator-Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, buku dan sebagainya. Penetapan Indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan



besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENYERAPAN	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.227.335.450	1.141.591.503		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	13.146.000	12.021.000	100	91,44
2	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	245.124.000	201.697.748	100	82,28
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000	5.665.000	99,99	28,33
4	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	265.291.500	256.008.500	100	96,50
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	110.652.450	110.652.450	100	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	59.633.500	59.441.500	100	99,68
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	46.095.000	46.095.000	100	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.500	14.999.400	100	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.800.000	18.610.000	100	100
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman	34.694.000	21.137.000	85,29	60,92
11	Penyediaan jasa pengman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	148.198.500	148.198.500	100	100
12	Perjalanan Dinas	250.700.000	247.065.405	98,55	98,55
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	788.259.050	748.601.030		
1	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	307.289.050	306.000.000	100	99,58
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	98.500.000	96.400.000	100	97,87
3	Pengadaan Mebeleur	93.090.000	92.640.000	100	99,52



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	4	Pengadaan peralatan perkantoran	31.280.000	30.950.000	100	98,95
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	152.600.000	118.551.030	100	77,69
	6	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	33.000.000	33.000.000	100	100
	7	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	27.500.000	26.535.000	100	96,49
	8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	45.000.000	44.525.000	100	98,94
III		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	108.000.000	100.730.000		
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	108.000.000	100.730.000	100	93,27
IV		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	56.000.000	39.750.000		
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	56.000.000	39.750.000	99	70,98
V		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	7.456.000	6.006.000		
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.456.000	6.006.000	100	80,55
VI		Program Perencanaan SKPD	8.989.000	8.264.000		
	1	Penyusunan rencana SKPD	8.989.000	8.264.000	100	91,93
VII		Program Pengembangan Data/Informasi	427.000.000	402.360.000		34,09
	1	Pengembangan Data/Informasi	427.000.000	402.360.000	97	94,23
VIII		Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik	971.398.000	914.106.600		89,93
	1	Verifikasi, Penerbitan, Identifikasi Dokumen Perizinan	458.875.000	420.671.600	99	91,67
	2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	221.325.000	219.025.000	100	98,96
	3	Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan perizinan	222.407.000	209.019.000	100	93,98
	4	Pengelola Data dan penataan arsip perizinan	68.791.000	65.391.000	100	95,06



IX		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	427.813.000	385.229.500		
	1	Pengembangan potensi unggulan Daerah	277.538.000	253.232.500	100	91,24
	2	Sosialisasi Penanaman Modal	61.250.000	54.097.000	100	88,32
	3	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	81.025.000	77.900.000	100	96,14
	4	Pengelolaan sistem pelayanan informasi dan perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)	8.000.000	0	0	0

Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal yang berdampak pada belum optimalnya penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim dan metode penyajian data keuangan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kegiatan **Belanja Langsung** capaian realisasi keuangan **93,15 %** atau sebesar **Rp. 4.022.250.000,-** dengan 9 (sembilan) program dan 33 (tigapuluh tiga) kegiatan, sedangkan **Belanja Tidak Langsung** capaian realisasi **83,51 %** atau sebesar **Rp. 2.761.067.938,-** dengan **Total Pagu Dana Tahun 2016** yang terlaksana sebesar **Rp. 6.052.508.205** atau **89,23 %** dari anggaran Rp. **6.783.317.938,-**.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2016

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu koordinasi perumusan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal Ssecara terpadu, dan fungsi perumusan kebijakan teknis dan penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan pelaksanaan koordinasi, memfasilitasi investor dan administrasi serta evaluasi terhadap pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal seseuai dengan Perpres Nomor 27 tahun 2009 tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bidang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memiliki tolak ukur pelayanan untuk menghasilkan mutu pelayanan prima yang terukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan kepastian hukum. Dalam Tahun 2016, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Jambi telah menerbitkan dokumen-dokumen perizinan sebagai berikut :

No	Jenis-jenis Dokumen Perizinan	Jumlah
1	HO	2.704 dokumen
2	SITU	2.637 dokumen
3	SIUP Besar	41 dokumen
4	SIUP Menengah	346 dokumen
5	SIUP Kecil	2.004 dokumen
6	SIUP Mikro	236 dokumen
7	SIUP Minuman Beralkohol	11 dokumen
8	TDP	2.861 dokumen
9	TDI	44 dokumen
10	TDG	37 dokumen
11	IUI	0 dokumen
12	IUJK	355 dokumen



No	Jenis-jenis Dokumen Perizinan	Jumlah
13	Salon	2 Dokumen
14	Restoran	17 Dokumen
15	Hiburan Umum	9 Dokumen
16	Apotek	17 Dokumen
17	Angkutan	4 Dokumen
18	PAUD	112 Dokumen
19	Bengkel	8 Dokumen
20	Hotel	12 Dokumen
21	RTGL	1.125 Dokumen
22	RTGL Perumahan	1.615 Dokumen
23	Ruko dan bangunan Lainnya	787 Dokumen
24	Ruko Sementara	0 Dokumen
25	Tower	4 Dokumen
26	IMBR	673 Dokumen
27	Prinsip	11 Dokumen

Dalam satu tahun Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi telah menerbitkan dokumen perizinan sebanyak 11.265 dokumen untuk Izin Usaha Baru. Adapun data rekap Jumlah Izin Registrasi/Daftar Ulang selama tahun 2016 sebanyak 14.543 dokumen.

Pada tahun 2016 terrealisasi investasi penanaman modal di Kota Jambi sebesar 2.104.401.841.760 dan mengalami peningkatan setiap tahun, sebagaimana di bawah ini :

No	Tahun	Realisasi PMDN	PMA	Jumlah
1	2014	391.573.244.050	-	391.573.244.050
2	2015	461.128.744.601	130.100.300.000	591.229.044.601
3	2016	2.104.401.841.760	-	2.104.401.841.760



Pada tahun 2016, terdapat beberapa perizinan yang memiliki standar kecil dilimpahkan pengurusannya ke Kecamatan (PATEN).

Kesemuannya indikator ini dapat dicapai dengan adanya dukungan sumber daya SKPD yang dimiliki oleh DPMPPTSP seperti :

- 1) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang handal.
- 2) Tempat, sarana dan prasarana kerja dan media informasi (IT),
- 3) Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan kerja (SOP) di bidang penanaman modal dan perizinan yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh perseorangan atau badan usaha,
- 4) Layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Era globalisasi mengajak semua negara termasuk Indonesia untuk melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya dalam menghadapi perekonomian global, dirasa perlu menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada di bidang penanaman modal dan bidang perizinan dengan maksud menciptakan iklim pemasaran modal yang kondusif, promotif, memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha. Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Permendagri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut maka penyelesaian tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP Kota Jambi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9



Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 09) adalah untuk membangun perekonomian masyarakat dibidang Penanaman Modal dan bidang Perizinan, dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan salah satu misi RPJM Kota Jambi.

Berdasarkan kondisi yang ada pada tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah melakukan kajian akademis terbaik terhadap data peluang dan potensi Investasi kota Jambi, hanya saja data tersebut perlu dilakukan kajian lebih detail terkait dukungan infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki Kota Jambi dengan lebih lengkap dan informasi yang di terima calon investor diharapkan akan mendorong minat investor untuk berinvestasi di Kota Jambi.

2.4. Analisa Isu-Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka pencapaian visi dan misi DPMPTSP Kota Jambi dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sehingga didapat faktor-faktor kunci dari Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Kendala yang dihadapi. Analisis Internal dimulai dari analisis Lingkungan Internal dan Eksternal.

1. Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (strengths)

- DPMPTSP Kota Jambi didirikan dengan dasar hukum yang jelas.
- Keputusan pemberian dan kewenangan penandatanganan perizinan kepada DPMPTSP.



- Bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan dengan prinsip mudah, nyaman sederhana.
- Sarana dan Prasarana yang relatif memadai.

Kelemahan (Weaknesses)

- Belum tersosialisasi secara jelas keberadaan DPMPTSP sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada publik.
- Kuantitas dan kualitas Sumber daya Manusia yang masih kurang memadai dan
- Belum adanya kejelasan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Belum adanya standard waktu untuk pelayanan pengurusan izin.
- Masih belum kuatnya integritas sumber daya aparatur internal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)

- Posisi Kota Jambi yang strategis dalam menopang berbagai investasi baik dari investasi lokal maupun luar.
- Dukungan Komitmen Kepala Daerah dan Legislatif untuk memperkuat fungsi DPMPTSP.
- Tumbuhnya kesadaran pengusaha dan kebijakan pemerintah untuk mengharuskan pengurusan perizinan.
- Dukungan dari lembaga Pemerintah yang lebih tinggi baik Provinsi maupun Pusat (Aplikasi Pelayanan

Ancaman (Threats)



- Rendahnya dukungan regulasi dari SKPD terkait yang memiliki fungsi pembina dan pengendali atas perizinan yang telah dilimpahkan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dalam menjalankan usahanya.
- Kurangnya kesempatan Diklat dan Bintek
- Adanya ancaman dan gangguan dari oknum Ormas/ LSM pada investasi-investasi yang baru di Kota Jambi.
- Strategi Analisa Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)

3. Strategi mengoptimalkan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

- Melakukan Promosi terkait fungsi Badan dan promosi potensi investasi yang dimiliki Kota Jambi.
- Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan mengoptimalkan peran Tim Teknis sebagai bagian penting DPMPTSP
- Menentukan standar waktu pelayanan untuk setiap pengurusan izin dan Meningkatkan transparansi proses pelayanan perizinan
- Mengutamakan penggunaan teknologi informasi sebagai basis pelayanan mulai Tahun 2015

4. Strategi mengoptimalkan Kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman

- Membangun kepercayaan bahwa semua bentuk perizinan dilakukan di DPMPTSP.
- Membangun sistem pelayanan yang berbasis IT sehingga dapat diakses secara cepat dan menyenangkan.



- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi semua perizinan dengan pemangku kepentingan.
- Membangun aplikasi yang mudah dan nyaman digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mengurus perizinan di DPMPTSP.

5. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang

- Mensosialisasikan dan membudayakan penggunaan IT secara luas dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP sekaligus pembelajaran terhadap masyarakat akan teknologi tersebut .
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dengan mengikuti BinteK yang dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah atau Swasta, sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal.
- Menetapkan SOP yang digunakan oleh pemangku kepentingan internal Dan Mempedomani Standard Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal serta didukung oleh dasar hukum yang kuat.
- Melaksanakan monitoring secara kontininyu guna menerima masukan dalam perbaikan pelayanan perizinan kepada pemangku kepentingan.

6. Strategi mengurangi kelemahan (weaknesses) untuk mencegah dan Mengatasi ancaman (Threats).

- Melakukan pemasangan leaflet dan pembagian brosur tentang pelayanan perizinan serta pembentukan produk hukum yang mengatur tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- Meningkatkan kualitas SDM dan mensosialisasikan menggunakan IT sebagai basis pelayanan di DPMPTSP.



- Menginternalisasi profesi pelayanan melalui sikap seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Menerapkan azas bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa Pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka kedepan diperkirakan terdapat 2 tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Jambi. Adapun 2 (dua) tema penting dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tema	Kondisi Sekarang	Proyeksi	Asumsi
1.	Arus Globalisasi	Cukup Intensif	Semakin Intensif	<ol style="list-style-type: none">1. Kemajuan Teknologi Semakin berkembang2. Intensitas persaingan kegiatan ekonomi internasional akan semakin tinggi
2.	Good Governance and Clean (Tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas)	Merupakan tuntutan yang cukup mendesak	Merupakan tuntutan yang sangat mendesak	<ol style="list-style-type: none">1. Akseibilitas informasi akan Semakin mudah diperoleh2. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi.3. Masarakat akan semakin kritis dalam menuntut pelayanan prima dan jauh dari KKN



Yang perlu dilakukan untuk mengatasi perubahan internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi adalah ;

1. Adanya komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah terhadap DPMPTSP Kota Jambi;
2. Tersedianya SDM yang profesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat dan investasi;
3. Adanya dukungan pendataan dan inventarisasi dalam kebijakan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah;
4. Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional yang jelas;
5. Penerapan kesepuluh prinsip pelayanan publik (kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu; akurasi; keamanan; tanggung jawab; kelengkapan sarana dan prasarana; kemudahan akses; Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; serta kenyamanan) secara konsekuen;
6. Penyederhanaan prosedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan Sistem Informasi pelayanan yang up to date ;



7. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait, para pengusaha dan investor dalam pengembangan investasi di Kota Jambi;
8. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan tahun berikutnya.
9. Adanya insentif yang memadai bagi pegawai DPMPSTSP agar dalam menyelesaikan proses perizinan pegawai bersangkutan tanpa memikirkan imbal balik dari para pengguna jasa.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

Review rancangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2016 (terlampir) akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal SKPD Tahun 2016 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2017, hal ini disebabkan karena program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi bersifat rutin dan terus menerus.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN (Rp.)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan.	Tersedianya administrasi surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	12.021.000	91,44
	Tersedianya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.	Tersedianya jaringan komunikasi, sumber daya listrik, air dan internet di kantor PTSP	201.697.748	82,28



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

	Tersedianya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan operasional	5.665.000	28,33
	Tersedianya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan.	Terlaksananya/tertibnya administrasi keuangan kantor	256.008.500	96,5
	Tersedianya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor.	Terjaganya kebersihan kantor	110.652.450	100
	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor.	Tersedia ATK untuk kelancaran kerja	59.441.500	99,68
	Tersedianya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja kantor	46.095.000	100
	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Tersedianya komponen listrik dan elektronik untuk penerangan dan kelancaran kerja kantor	14.999.400	100
	Tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah pengetahuan pegawai	18.610.000	100
	Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman.	Tersedianya makan dan minum tamu dan rapat untuk meningkatkan pelayanan kantor	21.137.000	60,92
	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.	Terlaksananya koordinasi, Konsultasi keluar daerah	247.065.405	98,55
	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam.	Terjaganya keamanan kantor dan kualitas pelayanan publik	148.198.500	100
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.	Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional.	Tersedianya kendaraan dinas dan operasional lapangan untuk kelancaran pelayanan publik	306.000.000	99,58
	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya AC Split 3 Unit, Kulkas 1 Unit, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, make/miniatur/diorama	96.400.000	97,87
	Terpenuhinya kebutuhan Mebeleur.	Tersedianya meja dan kursi kerja pegawai dan ruang rapat	92.640.000	99,52
	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Perkantoran.	Tersedianya peralatan kantor : mesin penghancur kertas, brankas, hardisk eksternal, printer laser, printer dot matrix, printer inkjet, infokus lengkap	30.950.000	98,95
	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang laik jalan (4 & 10 unit)	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang laik jalan (4 & 11 unit)	118.551.030	77,69



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**

1	2	3	4	5
	Terpeliharanya peralatan kantor yang laik pakai	Terpeliharanya peralatan kantor yang laik pakai	26.535.000	96,49
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	33.000.000	100
	Terciptanya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.	Terjaganya keindahan dan kenyamanan gedung kantor	44.525.000	98,94
Terpenuhinya kelengkapan berpakaian dinas sebagai citra dan kewibawaan dalam melaksanakan tugas.	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	Terpenuhinya pakaian pekerja pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai (PNS, Petugas Keamanan, FO, Pramubakti, CS, Petugas Lapangan)	100.730.000	93,27
Meningkatnya kemampuan serta pengetahuan aparatur yang berdampak profesionalisme kinerja terhadap pelayanan.	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Tersedianya pegawai yang terlatih ,terampil dan berawawasan.	39.750.000	70,98
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.	Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Tersedianya informasi kinerja LPPD dan Lakip	6.006.000	80,55
	Tersusunnya Renstra SKPD.	Tersusunnya rencana kerja SKPD, IKU, TAPKIN	8.264.000	91,93
Meningkatnya penyebaran informasi BPMPPT melalui web	Tersedianya data dan informasi BPMPPT Kota Jambi.	Terbangunnya sistem informasi pelayanan perijinan dan penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik (menuju pelayanan secara on line)	402.360.000	94,23



1	2	3	4	5
Terlaksananya pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan.	Terbangunnya sistem informasi pelayanan perijinan dan penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik (menuju pelayanan secara on line)	Tersedianya Data Base Perizinan serta tertatanya arsip perizinan	65.391.000	95,06
	Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terlaksananya monitoring perizinan dan terfasilitasinya pengaduan masyarakat serta terevaluasinya kinerja BPMPPT dengan angka IKM	209.019.000	93,98
	Tersedianya blanko semua jenis perizinan	tersedianya data verifikasi dan identifikasi perizinan dan tersedianya blanko semua jenis perizinan	420.671.600	91,67
	Rasio izin yang terbit	Tercapainya Pelayanan Perizinan yang Prima	219.025.000	98,96
Tersusunnya Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sekurang-kurangnya 1 bidang setiap tahunnya	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sekurang-kurangnya 1 bidang setiap tahunnya dan terpromosinya potensi investasi dan beberapa komoditi unggulan Kota Jambi	253.232.500	91,24
Fasilitasi kerjasama kemitraan Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 1 kali dalam setahun:	Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di kota jambi	77.900.000	96,14
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat dunia usaha	Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan penanaman modal (RKPPMD) Kota Jambi	54.097.000	88,32
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplemetasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (Spipise)	terwujudnya system pelayanan perizinan penanaman modal yang berbasis IT	0	0

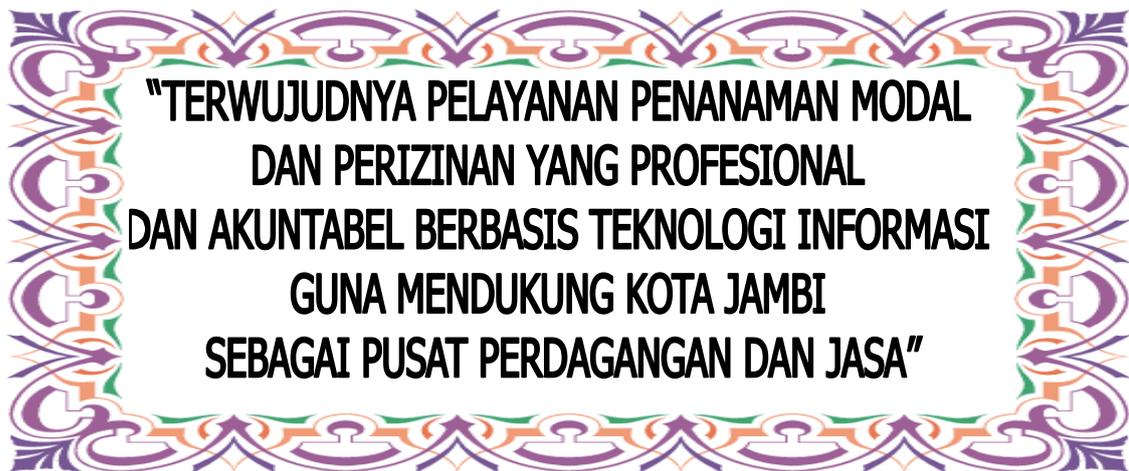
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi merupakan Perogram dan Kegiatan yang rutin dan kontinyu, dan bukan berasal dari usulan atau tindak lanjut dari aspirasi masyarakat.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi dan Misi



Visi tersebut diimplementasikan ke dalam misi-misi pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Jambi yang dijabarkan sebagai berikut :

- 
- 1.** Meningkatkan Kualitas SDM guna menciptakan aparatur yang profesional
 - 2.** Melakukan kajian Peluang dan Potensi Penanaman Modal
 - 3.** Melaksanakan Promosi Peluang dan Potensi Penanaman Modal
 - 4.** Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
 - 5.** Meningkatkan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
 - 6.** Melaksanakan Fasilitasi dan Kerjasama dalam rangka Penanaman Modal
 - 7.** Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan Tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu memberikan Pelayanan Prima kepada Investor pada khususnya dan Masyarakat Kota Jambi pada umumnya.
2. Dengan adanya kajian peluang dan potensi Badan penanaman modal diharapkan dapat memberikan usulan rumusan kebijakan penanaman modal kepada Walikota sehingga kebijakan yang diterapkan memberikan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.
3. Dengan adanya promosi peluang dan potensi penanaman modal, diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor yang ada di dalam dan luar negeri tentang Kota Jambi sebagai salah satu daerah tujuan potensial untuk berinvestasi.
4. Dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi investor pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
5. Dengan meningkatnya system informasi pelayanan perizinan penanaman modal, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses kepada pihak lain tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal.
6. Terciptanya sinergi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.



7. Dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan merupakan bagian penting dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memberikan Pelayanan melalui bimtek , magang dan sosialisasi.
2. Melakukan pembinaan dan evaluasi internal secara berkala.
3. Melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Jambi dengan pihak akademisi guna memperoleh kajian yang mendalam tentang potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi.
4. Merumuskan usulan kebijakan penanaman modal.
5. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan aset milik Pemerintah Kota Jambi.
6. Menanamkan image kepada investor dalam dan luar negeri bahwa Kota Jambi merupakan salah satu tujuan investasi di Provinsi Jambi.
7. Terciptanya kepercayaan publik terhadap integritas DPMPTSP Kota Jambi.
8. Terciptanya etos kerja yang tinggi pada aparatur di DPMPTSP Kota Jambi.
9. Terbangunnya sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik.



10. Implementasi system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) di Kota Jambi.
11. Terwujudnya kegiatan penanaman modal yang memberikan multiplier effect positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.
12. Mengurangi miskomunikasi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal.
13. Tersedianya data-data terkait penanaman modal dan perizinan di Kota Jambi.
14. Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kota Jambi.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan – kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Program dan kegiatan tahun 2015 dikelompokkan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor



7. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Perjalanan Dinas
12. Penyediaan jasa pengman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas /operasional
2. Pengadaan Mebeler
3. Pengadaan peralatan perkantoran
4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
8. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



E. Program Perencanaan SKPD

1. Penyusunan rencana SKPD

F. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perizinan
2. Pengelolaan data dan penataan arsip perizinan

G. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
2. Sosialisasi penanaman modal
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
4. Pengelolaan sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja

Misi Ke 2 : Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal Menuju Kemandirian Daerah

Tujuan : Mewujudkan peningkatan kinerja ekonomi yang merata dan berkelanjutan melalui penerapan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten, dan adil berbasis potensi daerah

SASARAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			AWAL	2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM, IKM dan aktivitas perekonomian	Realisasi investasi	%	N/A	30,00	50.00	70.00	85.00	100.00

Misi Ke 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional Dan Bersih (Clean Governance)

Tujuan : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (good government)

SASARAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			AWAL	2014	2015	2016	2017	2018
Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali

Pendanaan

Untuk membiayai berbagai Program dan Kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, diperlukan dana tersebut yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari dana alokasi umum. Dibandingkan dengan anggaran tahun berjalan, anggaran DPMPTSP lebih tinggi 10% dari Renja Tahun tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memperhitungkan faktor kondisi dan situasi yang mungkin terjadi pada tahun yang akan datang. DPMPTSP Kota Jambi akan bersikap realistis jika



memang anggaran pemerintah belum bisa mengakomodir semua anggaran yang ditetapkan dalam Renja DPMPTSP Kota Jambi, namun demikian DPMPTSP Kota Jambi tetap berharap alokasi anggaran dari APBD sebagaimana digariskan dalam kebijakan pemerintah pusat yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang kebijakan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi yang dapat direalisasikan dimasa mendatang.



BAB V

PENUTUP

Sebagai upaya untuk mencapai Visi dan Misi organisasi diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana Kinerja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2017. Selain itu penyusunan Rencana Kinerja juga dimaksudkan dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun ke depan sehingga visi dan misi DPMPTSP tetap dapat diwujudkan dan eksistensi DPMPTSP Kota Jambi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam Rencana Kerja.

Akhirnya kita berharap mudah-mudahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2018 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Jambi sehingga visi **“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI GUNA MENDUKUNG KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA”** dapat diwujudkan dengan baik.

**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) TAHUN 2018**

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		KETERANGAN
				RENJA 2018	PERUBAHAN RENJA 2018	RENJA 2018	PERUBAHAN RENJA 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Administrasi Surat Menyurat	12 bulan	1 tahun	9.360.000	4.860.000	
1.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik	Tersedianya jaringan komunikasi, sumber daya listrik, air dan internet di DPMPSTP	12 bulan	1 tahun	267.697.600	241.623.000	
1.3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional serta Perizinannya	12 Bulan	6 dan 19 Unit Kendaraan	14.400.000	12.750.000	
1.4		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	1 tahun	401.576.000	254.485.000	
1.5		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 tahun	1 tahun	120.729.100	125.027.000	
1.6		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	75.402.000	75.980.000	
1.7		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja kantor	12 bulan	1 tahun	80.350.000	85.675.000	
1.8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	16.500.000	16.500.000	
1.9		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi makanan dan minuman rapat dan tamu	1 tahun	1 tahun	32.300.000	39.800.000	
1.10		Perjalanan Dinas	Tersedianya konsumsi makanan dan minuman rapat dan tamu	1 tahun	1 tahun	348.580.300	424.908.000	
1.11		Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan front office	Tersedianya konsumsi makanan dan minuman rapat dan tamu	1 tahun	1 tahun	182.503.500	177.343.500	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas dan operasional	2 Motor	6 motor	34.000.000	35.000.000	

2.2		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor DPMP TSP Kota Jambi	1 tahun	1 tahun	188.910.000	76.400.000	
2.3		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meja dan kursi kerja pegawai dan ruang rapat	1 tahun	1 tahun	81.000.000	109.720.000	
2.4		Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan kantor yang layak pakai	1 tahun	1 tahun	20.690.000	152.000.000	
2.5		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	40.000.000	40.000.000	
2.6		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan kendaraan dinas operasional yang layak pakai	12 bulan	12 bulan	181.800.000	189.000.000	
2.7		Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Tersedianya alat-alat kantor yang layak pakai	1 tahun	1 tahun	30.000.000	30.000.000	
2.8		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terjaganya keindahan dan kenyamanan gedung kantor	100%	100%	86.750.000	-	
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
3.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian pekerja pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai (PNS, Petugas Keamanan, FO, Pramubakti, CS), Petugas lap, petugas Administrasi dan sopir	125 stel & 81 bh batik	128stel/85	126.050.000	143.315.000	
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4.1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya pegawai yang terlatih ,terampil dan berawawasan.	1 Tahun	1 th	60.000.000	20.000.000	
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
5.1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya informasi kinerja LPPD dan Lakip	2 dokumen	2 Dokumen	8.345.000	3.750.000	
6		Program perencanaan SKPD						
6.1		Penyusunan renstra SKPD	Tersusunnya rencana strategis SKPD, IKU, TAPKIN	1 Tahun	1 dokumen	-	4.285.000	
6.2		Penyusunan renja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD, IKU, TAPKIN	1 Tahun	3 dokumen	5.970.000	3.424.000	
7		Program pengembangan Data dan Informasi						
7.1		Pengembangan data/informasi	Tercapainya informasi pelayanan perizinan melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik (menuju pelayanan secara on line)	100%	100%	83.250.000	370.092.000	

8		Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik						
8.1		Verifikasi Penerbitan, Identifikasi, Dokumen Perizinan	Tersedianya Blanko Perizinan bagi pemohon	20 ribu pemohon	25 ribu pemohon	338.998.000	378.609.000	
8.2		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Tercapainya pelayanan Perizinan yang Prima	1 tahun	1 tahun	217.000.000	265.983.000	
8.3		Monitoring, Evaluasi dan pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Perizinan dan tersusunnya SKM serta Terfasilitasi Pengaduan Masyarakat serta terlaksananya pembinaan pelaksanaan perizinan di 8 Kecamatan	1.000 penanganan pengaduan	1500 penanganan pengaduan	166.813.000	153.312.000	
8.4		Pengelolaan data dan Penataan Arsip Perizinan	Tersedianya Informasi Jumlah Perizinan yang telah dikeluarkan serta tertata dan terpeliharanya arsip	1 dokumen	1 dokumen	60.133.000	13.415.000	
9		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						
9.1		Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terlaksananya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sekurang kurangnya satu bidang setiap tahun dan tepromosinya potensi investasi dan beberapa komoditi unggulan Kota Jambi	1 bidang & 2 keg	1 bidang & 2 Keg	263.237.000	198.560.000	
9.2		Sosialisasi Penanaman Modal	Terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan penanaman modal kota jambi	2 kegiatan	1 tahun	30.766.500	25.843.500	
9.3		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal dikota Jambi	50%	1 kegiatan	79.889.000	27.465.000	
9.4		Pengelolaan sistem pelayanan informasi dan perizinan Investasi secara Elektronik	Terwujudnya sistem pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang berbasis IT	50%	1 tahun	12.000.000	2.950.000	
						3.665.000.000	3.702.075.000	

Jambi, Agustus 2018
Kepala DPMPSTSP Kota Jambi



Fahmi, SP

Pembina TK.1

Nip. 19670205 199903 1 004

